

BAB II

EVALUASI KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

II.1. Evaluasi Kondisi Perekonomian Daerah

Kondisi perekonomian dunia yang bergejolak akibat krisis ekonomi global selama ini masih mempengaruhi kondisi ekonomi domestik Indonesia secara umum maupun Jawa Tengah secara khusus. Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, akan tetapi stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga. Perlambatan ekonomi bersumber dari melambatnya kinerja beberapa komponen permintaan domestik, seperti konsumsi pemerintah serta investasi bangunan dan untuk sisi eksternal tingkat ekspor masih melemah. Di sisi lain, stabilitas makro ekonomi masih tetap terjaga sejalan dengan inflasi yang terkendali serta nilai tukar rupiah mulai menguat dan relatif terkendali meskipun masih mengalami tekanan.

Selain itu pertumbuhan konsumsi, baik konsumsi rumah tangga, sebagai penyokong utama perekonomian, maupun konsumsi pemerintah, juga melambat walaupun dengan tingkatan yang lebih terbatas. Perlambatan pada hampir seluruh komponen penggunaan ini membuat perlambatan pada perekonomian Jawa Tengah. Melambatnya pertumbuhan ekonomi juga tercermin dari penyaluran kredit perbankan yang semakin melemah di bawah 10%.

Pada sisi lain, kebijakan perdagangan yang semakin terbuka sebagaimana yang diterapkan Indonesia saat ini, telah memperbesar resiko guncangan eksternal terhadap perekonomian domestik, khususnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kerjasama regional Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dimulai 15 Desember 2015 juga perlu menjadi perhatian bagi perekonomian Indonesia dan Jawa Tengah pada khususnya. Dengan dimulainya MEA, maka perekonomian regional akan semakin terbuka, yang akan berimplikasi pada terbukanya arus barang dan jasa antar negara ASEAN.

Liberalisasi perdagangan dan diplomasi ekonomi yang merupakan salah satu variabel penting pada pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat membentuk pola perdagangan yang efisien berdasarkan prinsip keunggulan komparatif. Adopsi dari prinsip keunggulan komparatif akan menjamin bahwa sebuah negara akan meraih kesejahteraan ekonomi yang lebih besar melalui partisipasi dalam perdagangan luar negeri daripada melalui proteksi perdagangan.

Sejak beberapa tahun terakhir, beberapa negara seperti Amerika Serikat mulai bangkit dan melakukan pemulihan dari keterpurukan ekonomi global. Hal tersebut secara tidak langsung berpengaruh pula pada situasi perekonomian nasional dan regional. Pemulihan ekonomi global tersebut masih berjalan tidak seimbang dengan risiko di pasar keuangan global yang masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tidak secepat perkiraan semula seiring lebih rendahnya prakiraan pertumbuhan ekonomi AS dan Tiongkok.

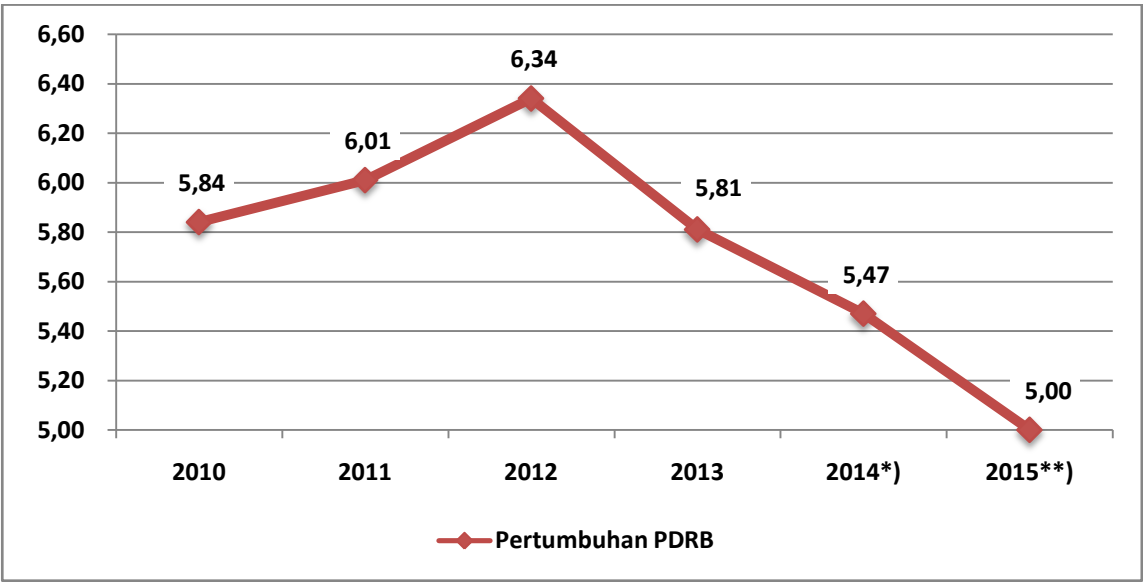
Perkembangan ekonomi makro Jawa Tengah masih lebih banyak didorong oleh peningkatan konsumsi, terutama konsumsi pemerintah (realisasi belanja APBD) dan rumah tangga. Kinerja sektor utama masih didominasi oleh sektor industri pengolahan; sektor perdagangan; hotel dan restoran; serta sektor pertanian.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas sertaantisipasi menghadapi MEA, kebijakan perekonomian Jawa Tengah ke depan antara lain diarahkan pada peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah, pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Secara rinci perkembangan kondisi perekonomian daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator berikut ini.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian Jawa Tengah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan selama kurun waktu 2009-2012 yang ditunjukkan dengan angka pertumbuhan ekonomi yang selalu meningkat, namun pada tahun 2013 dan 2014 mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 sebesar 5,47 % (Tahun Dasar 2000), sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun 2013 (5,81 %). Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2014 selain mengalami penurunan juga belum mampu memenuhi target yang tercantum dalam RPJMD (5,9%-6,4%). Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 pada triwulan 3 (tiga) yaitu sebesar 5,00% perlu mendapatkan perhatian yang cukup besar agar mampu sejalan dengan target kinerja Nasional (5,7%) dan target RPJMD (6,0% - 6,5%). Perkembangan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama 2010 – 2014 dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015

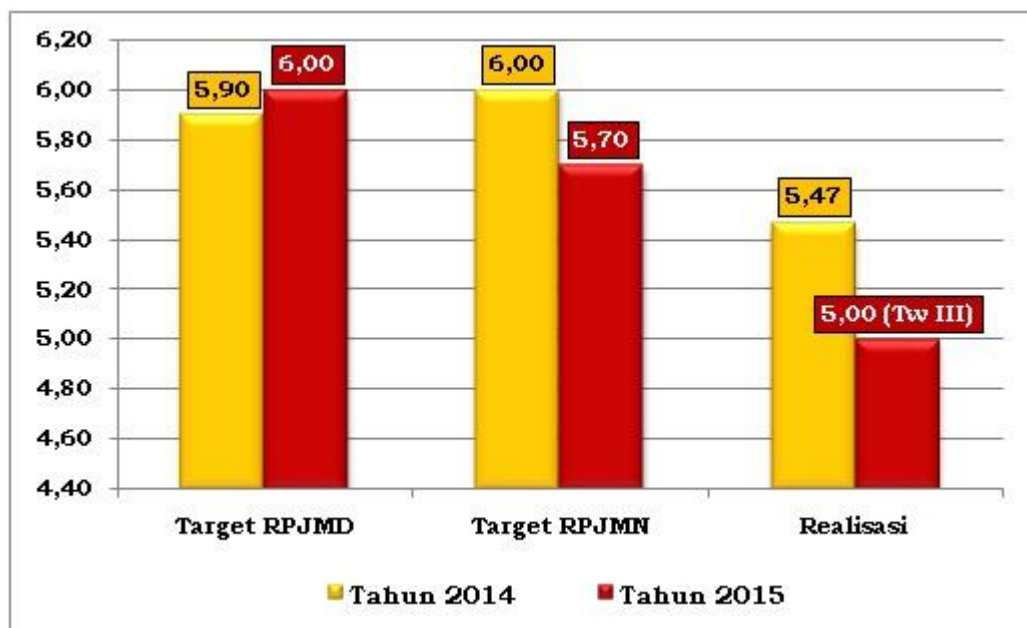
Terdapat dua faktor penyebab yang menghambat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dibentuk melalui tiga hal, yaitu konsumsi, pengeluaran pemerintah, dan penyerapan

investasi. Perlambatan perekonomian di Provinsi Jawa Tengah disebabkan oleh perlambatan kinerja sektor pertanian dalam kurun sejak tahun 2013. Perlambatan ini mendorong kepada perlambatan beberapa sektor lain yang mendukung. Dari sisi penyerapan anggaran, konsumsi pemerintah juga turut mengalami penurunan. Dari sisi investasi, penurunan kinerja ditunjukkan oleh perlambatan PMTB dari 9,6% pada tahun 2013 menjadi 6,7% pada tahun 2014.

Adapun faktor eksternal yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi adalah kondisi perekonomian dunia yang turut mengalami penurunan. Kondisi ini diperparah dengan kondisi nilai tukar mata uang yang mengalami penurunan. Penyebab lainnya adalah perkembangan gejolak ekonomi global dan terbukanya pasar bebas Asia Pasifik mengakibatkan tingginya persaingan antar produk. Hal ini berdampak pada menurunnya permintaan pasar global, nilai ekspor dan melambatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah aglomerasi, artinya terjadi pemusatan berbagai kegiatan ekonomi ke dalam suatu wilayah tertentu sehingga memunculkan pertumbuhan ekonomi baru pada wilayah tersebut. Selain berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, aglomerasi juga mempunyai manfaat lain yaitu efisiensi kolektif pada proses produksi pada skala menengah dan besar. Sebaran aglomerasi di Jawa Tengah antara lain di Kota Semarang dan Surakarta, Kabupaten Cilacap, Kudus, Pekalongan dan Kendal.

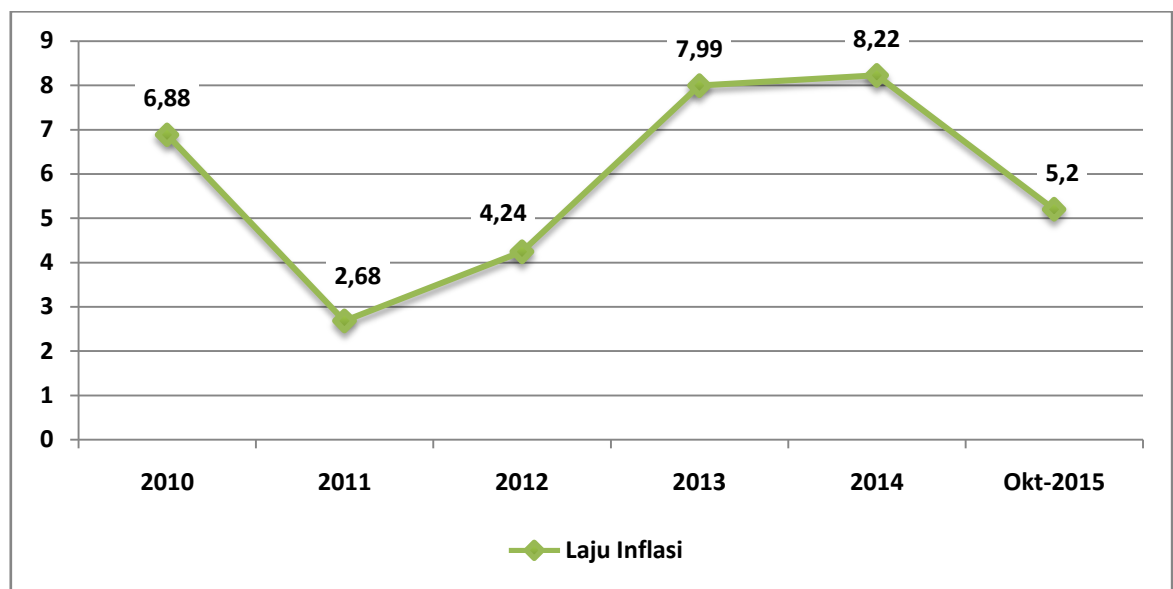
Secara rinci pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Perbandingan antara Target RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN terhadap Realisasi Kinerja Provinsi Jawa Tengah.

2. Inflasi

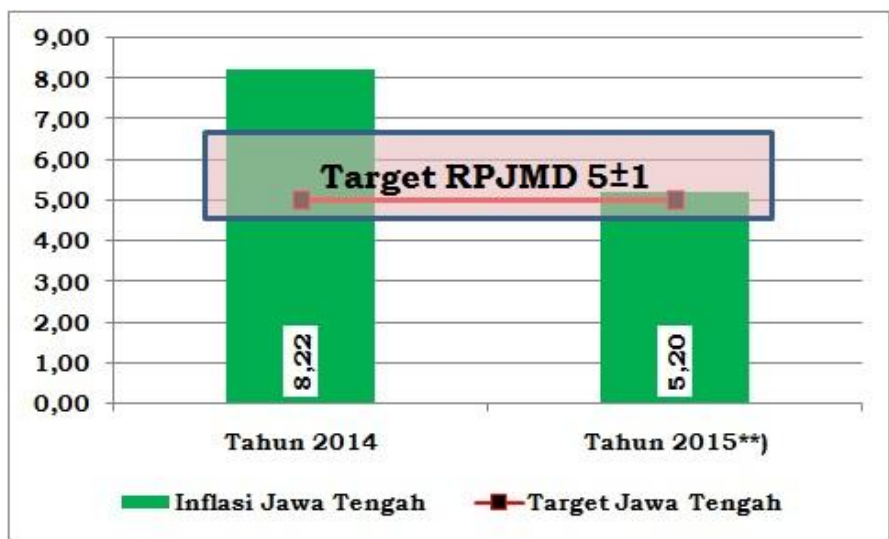
Inflasi (*year on year*) di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 mencapai 8,22%; merupakan inflasi paling tinggi dalam kurun waktu 2010-2014. Kenaikan inflasi meningkat dimulai dari tahun 2014 sebesar 58,21% menjadi 4,24%. Kenaikan inflasi paling besar terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 88,44% menjadi 7,99%. Perkembangan inflasi di Provinsi Jawa Tengah secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Inflasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014

Penyebab terjadinya kenaikan inflasi pada tahun 2014 lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat terkait dengan penyesuaian harga komoditas tertentu.

Pada tahun 2015 triwulan ke III, inflasi lebih banyak disebabkan oleh dorongan biaya pendidikan dan penurunan produksi bahan pangan yang disebabkan oleh perubahan pola tanam akibat perubahan musim (El-Nino).



Gambar 2.4 Perbandingan Capaian Inflasi dengan Target RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

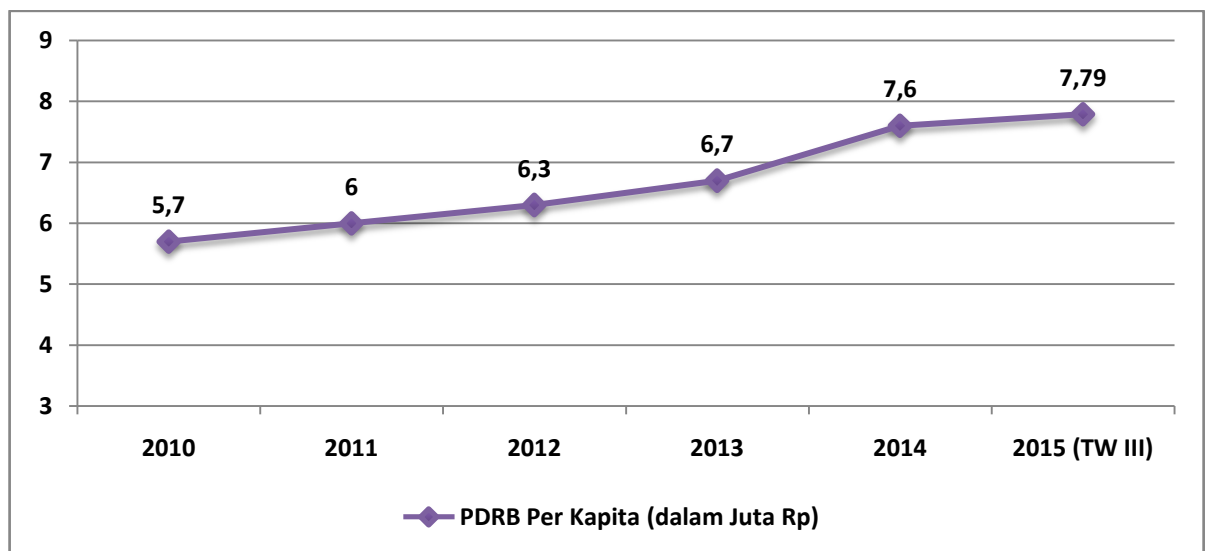
Inflasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 apabila dibandingkan dengan target kinerja RPJMD Provinsi Jawa Tengah masih berada dalam kondisi yang kurang baik. Hal ini disebabkan inflasi masih berada di atas target, yaitu sebesar 5±1. Selanjutnya untuk kondisi inflasi pada triwulan

III 2015 sudah mulai membaik yaitu sebesar 5,2%. Inflasi sudah mendekati target RPJMD Provinsi sebesar 5±1.

3. PDRB Per Kapita

Produktivitas penduduk sebuah wilayah secara matematis dapat dihitung menggunakan pendekatan PDRB per kapita, yaitu sebuah model matematis yang membagi antara pendapatan regional terhadap jumlah masyarakat pada tengah tahun. PDRB per kapita dihitung melalui pembagian antara PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu.

PDRB perkapita Provinsi Jawa Tengah pada kurun waktu 2010-2014 selalu mengalami peningkatan. PDRB per kapita pada tahun 2010 mencapai 5,7 juta meningkat menjadi 6,7 juta pada tahun 2013 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 7,6 juta. Capaian PDRB per kapita tahun 2014 sudah di atas target RPJMD Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 7,12 juta dan pada triwulan 3 (tiga) tahun 2015 sebesar 7,79. Perkembangan PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah secara rinci dapat dilihat pada gambar yang tersaji di bawah ini.



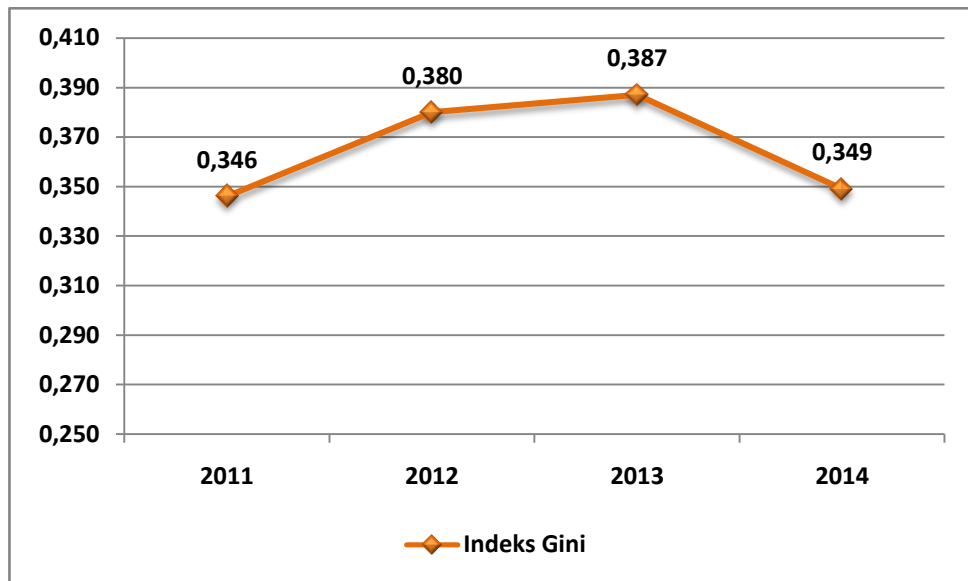
Gambar 2.5 Pertumbuhan PDRB perkapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015 (dalam juta rupiah)

4. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk menghitung ketidakmerataan atau ketimpangan agregat yang angkanya mencakup antara 0 (nol) hingga 1. Ketimpangan yang diukur menggunakan Indeks Gini biasanya bervariasi, tergantung kepada kebutuhan. Salah satu indikator yang dapat dihitung menggunakan indeks gini adalah ketimpangan terhadap pendapatan. Capaian Indeks Gini yang menunjukkan pada angka 0 (nol) berarti tidak ada ketimpangan pendapatan diantara satu penduduk dengan penduduk yang lain, sebaliknya apabila menunjukkan angka 1 (satu) maka terjadi kesenjangan pendapatan yang sangat tinggi antara penduduk satu dengan yang lainnya. Ketimpangan yang terjadi berdasarkan perhitungan menggunakan Indeks Gini dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah apabila capaian Indeks Gini berada di bawah 0,3

(<0,3); sedang apabila capaian Indeks Gini antara 0,3-0,4 ($0,3 \leq X \leq 0,4$); dan tinggi apabila capaian Indeks Gini mencapai lebih dari 0,4 ($>0,4$).

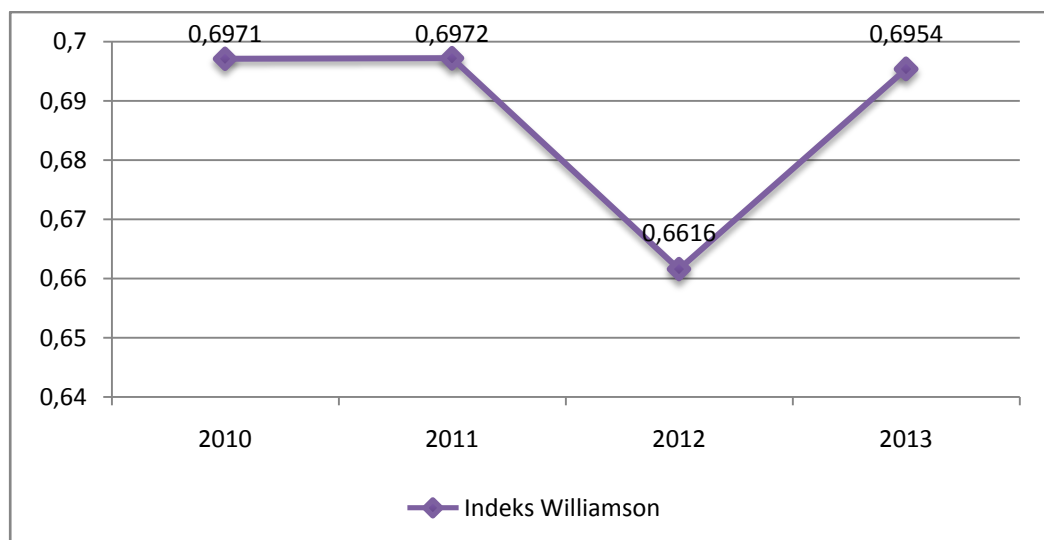
Secara rinci perkembangan Indeks Gini di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.6



Gambar 2.6 Perkembangan Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013

5. Indeks Williamson

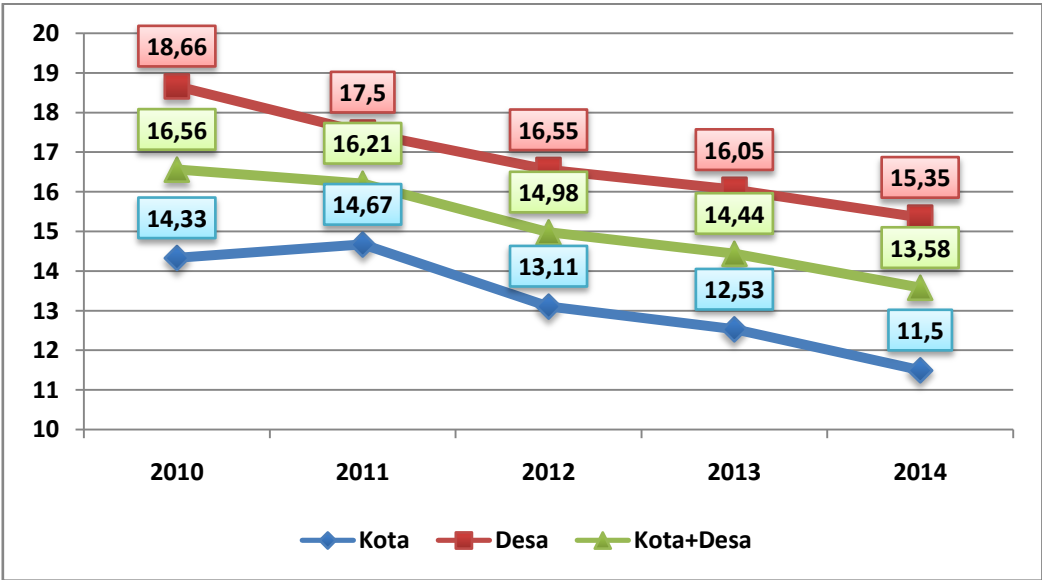
Indeks Williamson adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pada kurun waktu tahun 2010 – 2013 kesenjangan antar wilayah mengalami fluktuasi, namun cenderung untuk semakin menurun dengan Indeks Williamson sebesar 0,6971 pada tahun 2010 menjadi sebesar 0,6954 di tahun 2013. Indeks tersebut juga menunjukkan bahwa kesenjangan antar wilayah di Jawa Tengah tergolong masih cukup tinggi. Perkembangan Indeks Williamson Jawa Tengah tahun 2010 – 2013 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 2.7 Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013

6. Persentase Penduduk Miskin

Perkembangan kemiskinan di Jawa Tengah selama kurun waktu 2010 – 2014 cenderung mengalami penurunan, namun jumlah absolutnya masih cukup besar dan belum sesuai dengan target pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018. Jumlah penduduk miskin tahun 2014 sebanyak 4,561 juta jiwa (13,58%) telah mengalami penurunan kurang lebih sebanyak 143,04 ribu (0,86%) dibanding tahun 2013 yang sebanyak 4,704 juta jiwa (14,44%). Domisili penduduk miskin sebagian besar berada di pedesaan dibandingkan di perkotaan. Pada tahun 2014 penduduk miskin pedesaan sebanyak 2,790 juta jiwa (15,35%) sedangkan di perkotaan sebanyak 1,771 juta jiwa (11,50%). Secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 2.8 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah

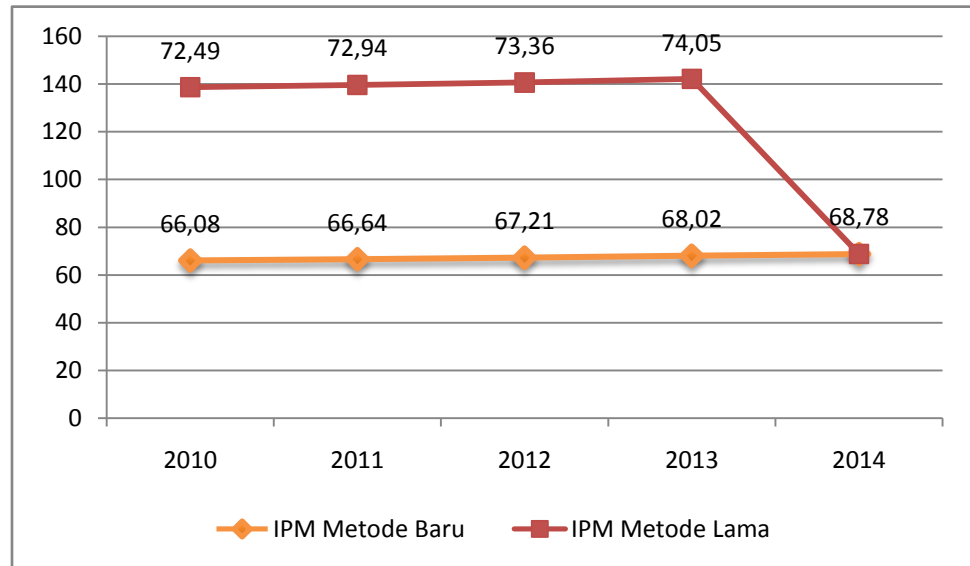
7. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Pada periode sebelumnya, indikator pembentuk IPM adalah Rata-rata lama sekolah, Angka Melek Huruf, Usia Harapan Hidup, dan PDRB perkapita yang disesuaikan. Pada tahun 2014, terdapat metode penghitungan IPM yang baru; yaitu dengan menghilangkan indikator Angka Melek Huruf (AMH) menjadi Harapan Lama Sekolah (HLS); PDRB per kapita menjadi PNB perkapita; dan metode penghitungan yang awalnya menggunakan metode rata-rata aritmatik diganti dengan rata-rata geometrik. Konsekuensi dari perubahan metode tersebut menyebabkan capaian IPM di seluruh wilayah Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan hasil perhitungan IPM dengan menggunakan metode sebelumnya; termasuk capaian IPM Provinsi Jawa Tengah.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah pada kurun waktu 2010-2014 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2010

IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 66,08 meningkat menjadi 66,64 pada tahun 2011 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2012 (67,21), 2013 (68,02), dan 2014 (68,78). Perkembangan IPM Provinsi Jawa Tengah secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

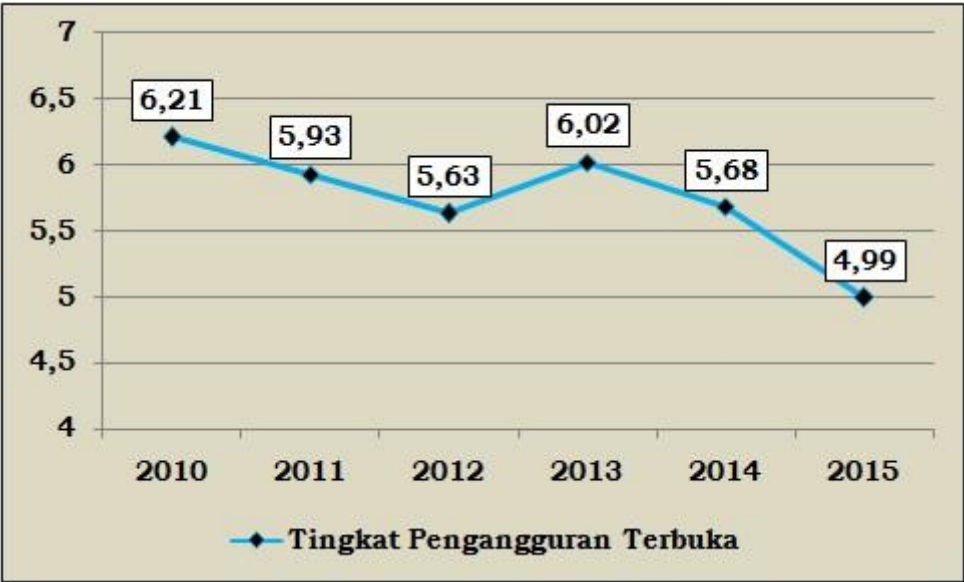


Gambar 2.9 Perbandingan Capaian IPM Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Metode Baru dan Metode Lama Tahun 2010-2014

8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen. TPT dihitung secara matematis dengan membandingkan antara jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penyerapan tenaga kerja dan seringkali digunakan oleh pemerintah dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah selama periode tahun 2010 – 2015 mengalami penurunan, walaupun pernah mengalami kenaikan pada tahun 2013 yang diakibatkan adanya kebijakan kenaikan BBM, kenaikan inflasi dikarenakan terhambatnya distribusi barang-barang akibat musibah banjir, dan bertambahnya lulusan baru pencari kerja yang belum mendapat pekerjaan. TPT secara rinci dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 2.10 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015

Secara rinci realisasi Pencapaian target RPJMD pada indikator-indikator makro pembangunan daerah tercantum pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Realisasi Pencapaian target RPJMD pada indikator-indikator makro pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	2011	2012	2013	2014		2015		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi	Target RPJMD	Target RPJMN	Realisasi
1	Pertumbuhan PDRB	6,01	6,34	5,81	5,9 - 6,4	5,47	6,0 - 6,5	5,7	5,17
2	Laju Inflasi	2,68	4,24	7,99	5 ± 1	8,22	5 ± 1		1,41
3	PDRB Per Kapita	6	6,3	6,7	7,12	7,6	7,44		3,97
4	Indeks Gini	0,346	0,380	0,387	0,349		0,347		
5	Indeks Williamson	0,6972	0,6616	0,6954	0,7015		0,7007		
6	Persentase Penduduk Miskin	15,72	15,34	14,56	11,58 - 11,37	14,46	9,05 - 8,77	13,1	13,58
7	Indeks Pembangunan Manusia	72,94	73,36	74,05	74,24		74,68		
a	Angka Melek Huruf	90,34	90,45	91,71	91,06		91,36		
b	Rata-rata Lama Sekolah	7,29	7,39	7,43	7,65		7,78		
c	Usia Harapan Hidup	71,55	71,71	71,97	71,7		71,77		
d	Tingkat Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	640.410	643.530	646.440	806.273		887.645		
8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	66,45	66,8	67,97	67,63		68,22		
9	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,99	69,06	71,22	69,99		70,49		
10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,63	6,02	5,68	5,31 - 4,77	5,7	4,93 - 4,62	4,7	5,3

II.2. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Evaluasi kinerja keuangan mencakup evaluasi pendapatan daerah, struktur belanja dan evaluasi kemampuan keuangan daerah, evaluasi pelaksanaan anggaran berdasarkan prioritas, dan perkiraan pendapatan pada masa datang. Keuangan Daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan belanja dan pembiayaan daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja.

1. Evaluasi Pendapatan Daerah

Capaian kinerja pendapatan daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah bersumber dari PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah, dengan proporsi terbesar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber utama PAD Provinsi Jawa Tengah berasal dari Pajak Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Secara rinci perkembangan realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2013-2015 terhadap target RPJMD dapat dilihat pada Tabel 2.2, dan realisasi pendapatan daerah terhadap target RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.2
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah terhadap Target RKPD Tahun 2013-2015
Provinsi Jawa Tengah

No	URAIAN	KINERJA								
		2013			2014			2015 (TW 3)		
		Target APBD-P	Realisasi	%	Target APBD-P	Realisasi	%	Target APBD-P	Realisasi	%
1	PENDAPATAN	12.665.103.924.000	13.343.358.327.576	105.36	14.425.140.107.000	15.157.460.004.461	105.08	18.222.726.402.000	12.695.190.342.829	69,67
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.413.086.681.000	8.212.800.640.888	110.79	9.097.476.269.000	9.916.358.231.432	109.00	12.068.029.759.000	8.025.833.295.728	66,50
	Pajak Daerah	6.018.189.560.000	6.716.170.095.198	111.60	7.819.097.466.000	8.213.117.977.920	105.04	10.512.318.175.000	6.579.455.959.173	62,59
	Retribusi Daerah	74.296.390.000	69.970.595.550	94.18	78.489.524.000	79.460.952.663	101.24	92.911.445.000	66.438.316.313	71,51
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	263.267.935.000	263.267.978.393	100.00	290.527.248.000	291.844.276.152	100.45	320.425.076.000	320.621.927.694	100,06
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.057.332.796.000	1.163.391.971.747	110.03	909.362.031.000	1.331.935.024.697	146.47	1.142.375.063.000	1.059.317.092.548	92,73
2	DANA PERIMBANGAN	2.477.186.612.000	2.467.814.628.973	99.62	2.617.601.162.000	2.542.626.744.680	97.14	2.453.176.453.000	1.913.607.966.340	78,01
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	723.804.733.000	714.432.749.973	98.71	734.504.733.000	659.530.315.680	89.79	765.774.530.000	509.372.174.340	66,52
	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.670.859.369.000	1.670.859.369.000	100.00	1.803.931.189.000	1.803.931.189.000	100.00	1.629.429.283.000	1.357.857.680.000	83,33
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	82.522.510.000	82.522.510.000	100.00	79.165.240.000	79.165.240.000	100.00	57.972.640.000	46.378.112.000	80,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	2.774.830.631.000	2.662.743.057.715	95.96	2.710.062.676.000	2.698.475.028.349	99.57	3.701.520.190.000	2.755.749.080.761	74,45
	Hibah	27.910.690.000	24.326.664.073	87.16	29.075.706.000	29.186.771.349	100.38	34.461.280.000	26.225.323.300	76,10
	DBH Pajak dari Provinsi & Pemda lainnya	-	1.315.400.207	-	-	1.322.069.000	-	1.143.374.000	1.145.624.114.000	100,20

No	URAIAN	KINERJA								
		2013			2014			2015 (TW 3)		
		Target APBD-P	Realisasi	%	Target APBD-P	Realisasi	%	Target APBD-P	Realisasi	%
	Dana Penyesuaian	2.725.093.810.000	2.615.274.862.435	95.97	2.677.986.970.000	2.664.966.188.000	99.51	3.641.588.000.000	2.704.050.597.347	74,25
	Dana Insentif Daerah	21.826.131.000	21.826.131.000	100.00	3.000.000.000	3.000.000.000	100.00	24.327.536.000	24.327.536.000	100,00
	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.3
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah terhadap Target RPJMD Tahun 2013 - 2015
Provinsi Jawa Tengah

No	Uraian	2013			2014			2015		
		Target RPJMD (Rp.000)	Realisasi (Rp. 000)	% capaian	Target RPJMD (Rp. 000)	Realisasi (Rp. 000)	% capaian	Target RPJMD (Rp. 000)	Realisasi (s/d TW III) (Rp. 000)	% capaian
1	PAD	7.413.086.681	8.212.800.640	110,79	8.347.874.665	9.916.358.231	118,79	9.978.524.375	8.025.833.295	80,43
1.1	Pajak Daerah	6.018.189.560	6.716.170.095	111,60	7.097.094.340	8.213.117.977	115,73	8.562.642.726	6.579.455.959	76,84
1.2	Retribusi Daerah	74.296.390	69.970.595	94,18	78.031.283	79.460.952	101,83	83.728.252	66.438.316	79,35
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	263.267.935	263.267.978	100,00	279.440.000	291.844.276	104,44	315.988.577	320.621.927	101,47
1.4	Lain-lain PAD	1.057.332.796	1.163.391.971	110,03	893.309.042	1.331.935.024	149,10	1.016.164.820	1.059.317.092	104,25
2	Dana Perimbangan	2.477.186.612	2.467.814.628	99,62	2.606.901.162	2.542.626.744	97,53	2.430.854.338	1.913.607.966	78,72
2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	723.804.733	714.432.749	98,71	723.804.733	659.530.315	91,12	759.994.9609	509.372.174	6,70
2.1	Dana Alokasi Umum	1.670.859.369	1.670.859.369	100,00	1.803.931.189	1.803.931.189	100,00	1.670.859.369	1.357.857.680	81,27
2.2	Dana Alokasi Khusus (DAK)	82.522.510	82.522.510	100,00	79.165.240	79.165.240	100,00	-	46.378.112	
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.774.830.631	2.662.743.057	95,96	2.782.382.356	2.698.475.028	96,98	2.776.706.650	2.755.749.080	99,25
3.1	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	2.725.059.810	2.615.274.862	95,97	2.750.306.650	2.664.966.188	96,90	2.750.306.650	2.704.050.597	98,32
3.2	Dana Insentif Daerah	21.826.131	21.826.131	100,00	3.000.000	3.000.000	100,00	-	24.327.536	
3.3	Pendapatan Hibah	27.910.690	24.326.664	87,16	29.075.706	29.186.771	100,38	26.400.000	26.225.323	99,34
3.4	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur	-			-			-		

No	Uraian	2013			2014			2015		
		Target RPJMD (Rp.000)	Realisasi (Rp. 000)	% capaian	Target RPJMD (Rp. 000)	Realisasi (Rp. 000)	% capaian	Target RPJMD (Rp. 000)	Realisasi (s/d TW III) (Rp. 000)	% capaian
3.4	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan	-	1.315.400		-	1.322.069		-	1.145.624.114	
	Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)	12.665.103.924	13.343.358.327	105,36	13.737.158.183	15.157.460.004	110,34	15.186.085.363	12.695.190.342	83,60

Berdasarkan Tabel 2.3 dapat terlihat bahwa apabila dibandingkan dengan target RPJMD, realisasi pendapatan daerah selalu melebihi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Pada tahun 2013, persentase capaian target RPJMD sebesar 105,36%, dan pada tahun 2014 sebesar 110,34%. Pada tahun 2015 pencapaian target pendapatan RPJMD sampai dengan triwulan III mencapai sebesar 83,60%, diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2015 persentase capaian mencapai 100%.

Dilihat secara detail, pencapaian target RPJMD pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu di atas 100% pada tahun 2013 (110,79%) dan tahun 2014 (118,79%). Untuk tahun 2015 pencapaian target PAD sampai dengan triwulan III sebesar 80,43% dan diperkirakan dapat mencapai di atas 100% pada akhir tahun 2015. Pada unsur dana perimbangan pencapaian target RPJMD masih di bawah 100%, artinya bahwa realisasi pendapatan dari dana perimbangan belum sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Persentase capaian target RPJMD dana perimbangan tahun 2013 sebesar 99,62%, tahun 2014 sebesar 97,53%, dan tahun 2015 sampai dengan triwulan III sebesar 78,72%, diperkirakan belum dapat mencapai angka 100%. Pada unsur Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah persentase capaian target RPJMD juga masih belum optimal karena belum mencapai 100%, yaitu pada tahun 2013 sebesar 95,96%, tahun 2014 sebesar 96,98%, dan pada tahun 2015 sebesar 99,25%.

Dilihat dari pertumbuhannya selama kurun waktu tahun 2013-2014, realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah tumbuh antara 13,60% hingga 20,22%. Dana perimbangan tumbuh sebesar 3,03% pada tahun 2013 dan sebesar 3,52% pada tahun 2015. Sementara itu Lain-Lain Pendapatan Yang Sah meningkat sebesar 1,34% pada tahun 2013 dan sebesar 37,17% pada tahun 2014. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum PAD dan lain-lain pendapatan yang sah tumbuh sesuai dengan harapan, namun dana perimbangan pertumbuhannya semakin menurun, sehingga kurang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Pertumbuhan realisasi pendapatan daerah tahun 2013-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013 - 2015
Provinsi Jawa Tengah

No	URAIAN	2013	2014
		%	%
	PENDAPATAN	13,60	20,22
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20,74	21,70
	Pajak Daerah	22,29	27,99
	Retribusi Daerah	13,56	16,93
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10,85	9,79
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	14,49	(14,23)

No	URAIAN	2013	2014
		%	%
2	DANA PERIMBANGAN	3,03	(3,52)
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	(7,68)	16,11
	Dana Alokasi Umum (DAU)	7,96	(9,67)
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	(4,07)	(26,77)
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	1,34	37,17
	Hibah	19,98	18,07
	DBH Pajak dr Prov&Pemda lainnya	0,51	(13,52)
	Dana Penyesuaian	1,90	36,65
	Dana Insentif Daerah	(86,26)	710,92
	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga		
	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah		
	Pendapatan Lainnya		

Sumber : DPPAD dan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah, 2015

Kontribusi masing-masing sumber pendapatan dapat dilihat dari proporsinya terhadap total pendapatan daerah. Di Jawa Tengah proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah kurun waktu tiga tahun (2013 – 2015) sangat tinggi, yaitu antara 61,55% hingga 65,42%, dengan sumber terbesar berasal dari pajak daerah. Dana Perimbangan dari pemerintah pusat hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sekitar 15,07% hingga 18,49%, dan sisanya berupa lain-lain pendapatan daerah yang sah antara 17,80% hingga 21,71%. Kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2015 (TW3)

No	Uraian	Proporsi %		
		2013	2014	2015 (TW3)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	61,55	65,42	63,22
1.1	Pajak Daerah	50,33	54,19	51,83
1.2	Retribusi Daerah	0,52	0,52	0,52
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1,97	1,93	2,53
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8,72	8,79	8,34
2	DANA PERIMBANGAN	18,49	16,77	15,07
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	5,35	4,35	4,01
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	12,52	11,90	10,70

No	Uraian	Proporsi %		
		2013	2014	2015 (TW3)
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,62	0,52	0,37
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	19,96	17,80	21,71
3.1	Dana Penyesuaian	19,60	17,58	21,30
3.2	Dana Insentif Daerah	0,16	0,02	0,19
3.3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga	0,18	0,19	0,21
3.4	Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov & Pemda	0,01	0,01	0,01
	JUMLAH PENDAPATAN	100,00	100,00	100,00

Sumber : DPPAD Provinsi Jawa Tengah, 2013

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dari sisi pendapatan realisasi selama kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2015 pencapaiannya sesuai dengan target pendapatan daerah dalam RPJMD, sehingga target pendapatan daerah dalam RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan.

2. Evaluasi Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa serta Belanja Tidak Teduga. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, meliputi :

- Belanja Pegawai, untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Jasa Non PNS;
- Belanja Barang dan Jasa, untuk pengeluaran bahan pakai habis, bahan material, jasa kantor, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya;
- Belanja Modal, untuk pengeluaran pengadaan tanah, gedung, alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan air bermotor, alat-alat angkutan air

tidak bermotor, alat-alat bengkel, pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain.

Arah kebijakan belanja daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, termasuk belanja BLUD, DBHCHT dan pendampingan DAK;
- b. Pemenuhan Dana Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota;
- c. Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk fungsi pendidikan;
- d. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Jawa Tengah;
- e. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan nasional dan regional;
- f. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah Kabupaten/ Kota melalui Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :

- a) Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun ke depan;
- b) Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
- c) Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
- d) Mengakomodir program pembangunan yang dijangkau melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang;
- e) Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
- f) Diarahkan untuk mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
- g) Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk pembiayaan pendidikan.

Perkembangan Belanja daerah Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 3 (tiga) tahun (2013-2015), cenderung mengalami peningkatan baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Secara proporsi, Belanja Tidak Langsung lebih besar dibandingkan Belanja Langsung. Hal tersebut dikarenakan komponen Belanja Tidak Langsung tidak hanya untuk Belanja Pegawai, namun juga meliputi Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, serta Belanja Tidak Terduga yang kesemuanya bukan merupakan belanja rutin, namun merupakan belanja modal atau pembangunan di Kabupaten/Kota

serta bantuan langsung kepada masyarakat. Banyak program pembangunan khususnya pembangunan pertanian, pengembangan ekonomi lokal, penanganan infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan pendidikan yang harus ditangani merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga untuk percepatan pelaksanaan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar Kabupaten/Kota maka penyediaan anggaran tidak dapat dialokasikan pada Belanja Langsung, namun melalui Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

Gambaran perkembangan realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2013 – 2015 (s/d TW 3) terhadap anggaran belanja dalam APBD-P dapat dilihat pada Tabel 2.6, dan perkembangan realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap anggaran belanja dalam RPJMD dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.6
Realisasi Belanja Daerah Terhadap Anggaran Belanja dalam APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2015 (TW3)

No	BELANJA	2013		2014		2015	
		APBD P	Realisasi	APBD P	Realisasi	APBD P	Realisasi
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.913.487.359.000	9.213.696.622.973	9.913.487.359.000	10.808.021.354.077	11.052.132.497.656	7.960.653.767.445
1	Belanja Pegawai	1.505.737.434.000	1.368.517.191.270	9.913.487.359.000	9.213.696.622.973	2.451.025.833.000	1.634.218.228.670
2	Belanja Hibah	3.797.603.390.000	3.499.864.176.508	3.035.945.308.000	2.963.856.035.218	2.913.067.653.000	2.778.426.432.580
3	Belanja Bantuan Sosial	15.337.075.000	14.362.375.000	39.226.000.000	23.281.040.000	28.557.200.000	14.050.300.000
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.646.831.943.000	2.503.166.398.279	3.293.380.678.000	3.263.403.899.363	4.295.303.353.000	2.596.841.131.455
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.910.083.517.000	1.825.598.247.238	2.899.415.095.000	2.661.510.573.135	1.947.394.895.000	925.996.072.540
6	Belanja Tidak Terduga	37.894.000.000	2.188.234.678	97.681.263.000	8.211.750.300	30.000.000.000	11.121.602.200
B	BELANJA LANGSUNG	3.771.197.120.000	3.511.079.685.461	4.560.325.906.000	4.278.043.680.345	5.672.337.400.000	3.091.478.730.211
1	Belanja Pegawai	406.979.346.000	373.147.586.146	336.459.486.000	309.678.431.527	349.994.085.000	271.105.112.646
2	Belanja Barang dan Jasa	2.309.422.856.000	2.143.191.579.201	2.563.476.327.000	2.397.685.838.048	2.645.250.074.000	2.050.914.886.057
3	Belanja Modal	1.054.794.918.000	994.740.520.114	1.660.390.093.000	1.570.679.410.770	2.677.093.241.000	769.458.731.508
	Jumlah	13.684.684.479.000	12.724.776.308.434	16.038.948.597.000	15.086.065.034.422	17.337.686.334.000	11.052.132.497.656
	Surplus (Defisit)	1.019.580.555.000	618.582.019.142	1.613.808.490.000	71.394.970.039	240.000.000.000	1.643.357.845.173
C	PEMBIAYAAN						
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	1.225.371.555.000	1.306.017.471.526	1.668.808.490.000	1.689.438.284.603	450.000.000.000	243.292.083
	Penggunaan SILPA	755.371.555.000	755.371.554.796	1.688.808.490.000	1.688.808.490.668	450.000.000.000	
	Pencairan Dana Cadangan	500.000.000.000	549.991.811.737				
	Penerimaan Dana Pinjaman Pokok Dana Talangan Pengadaan Pangan		67.272.727		254.090.908		
	Penerimaan Dana Pinjaman Pokok Dana Bergulir		586.832.266		375.703.027		243.292.083

No	BELANJA	2013		2014		2015	
		APBD P	Realisasi	APBD P	Realisasi	APBD P	Realisasi
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	1.255.371.555.000	1.306.017.471.526	1.688.808.490.000	1.689.438.284.603	450.000.000.000	243.292.083
2	Pengeluaran Daerah	235.791.000.000	235.791.000.000	75.000.000.000	72.000.000.000	210.000.000.000	35.000.000.000
	Penyertaan Modal(investasi) Pemerintah Daerah	235.791.000.000	235.791.000.000	75.000.000.000	72.000.000.000	50.000.000.000	35.000.000.000
	Pembentukan Dana Cadangan					160.000.000.000	
	Jumlah Pengeluaran Daerah	235.791.000.000	235.791.000.000	75.000.000.000	72.000.000.000	210.000.000.000	35.000.000.000
	Pembiayaan Netto	1.019.580.555.000	1.070.226.471.526	1.613.808.490.000	1.617.438.284.603	240.000.000.000	(34.756.707.917)
	SILPA	2.039.161.110.000	1.688.808.490.668	3.227.616.980.000	1.688.833.254.642	480.000.000.000	1.608.601.137.256

Tabel 2.7
Realisasi Belanja Daerah Terhadap Anggaran Belanja dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2015 (TW3)

No	BELANJA	2013		2014		2015	
		Target RPJMD	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi	Target RPJMD	Realisasi
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	-	9.213.696.622.973	9.837.614.877.000	10.808.021.354.077	10.391.713.437.000	7.960.653.767.445
1	Belanja Pegawai	998.664.531.000	1.368.517.191.270	1.277.912.547.000	9.213.696.622.973	2.443.698.229.000	1.634.218.228.670
2	Belanja Hibah	-	3.499.864.176.508	-	2.963.856.035.218	-	2.778.426.432.580
3	Belanja Bantuan Sosial	-	14.362.375.000	-	23.281.040.000	-	14.050.300.000
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.648.195.192.000	2.503.166.398.279	2.720.713.995.000	3.263.403.899.363	3.227.190.236.000	2.596.841.131.455
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	1.825.598.247.238	-	2.661.510.573.135	-	925.996.072.540
6	Belanja Tidak Terduga	37.894.000.000	2.188.234.678	30.000.000.000	8.211.750.300	55.000.000.000	11.121.602.200
B	BELANJA LANGSUNG	-	3.511.079.685.461	4.159.543.306.000	4.278.043.680.345	4.519.371.926.000	3.091.478.730.211
1	Belanja Pegawai	-	373.147.586.146		309.678.431.527		271.105.112.646
2	Belanja Barang dan Jasa	-	2.143.191.579.201		2.397.685.838.048		2.050.914.886.057
3	Belanja Modal	-	994.740.520.114		1.570.679.410.770		769.458.731.508
	Total Belanja		12.724.776.308.434		15.086.065.034.422		11.052.132.497.656

Berdasarkan Tabel 2.7, realisasi belanja daerah mengalami peningkatan dari sebesar Rp12.724.776.308.434 pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp15.086.065.034.422 pada tahun 2014, dan sebesar Rp11.052.132.497.656 pada tahun 2015. Apabila dibandingkan antara target RPJMD dengan realisasinya, selama kurun waktu tahun 2013-2015 belanja pegawai capaiannya lebih tinggi dari anggaran dalam RPJMD, Belanja Bagi Hasil capaiannya lebih tinggi dari rencana dalam RPJMD, dan Belanja Tidak Terduga capaiannya lebih rendah dari rencana dalam RPJMD.

3. Evaluasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya dan pada hakekatnya meliputi transaksi keuangan yang, menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Evaluasi pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah provinsi diarahkan pada:

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
- b. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian;
- c. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan perencanaan anggaran;
- d. Membentuk dana cadangan.

Pembiayaan daerah Provinsi Jawa Tengah baik dari sisi penerimaan maupun pembiayaan daerah secara umum dari Tahun 2013 – 2015 lebih tinggi dari rencana dalam RPJMD. Penerimaan pembiayaan paling banyak bersumber dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan daerah paling banyak untuk Penyertaan Modal (Investasi) daerah.

Realisasi pembiayaan daerah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2013 – 2015 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.8

Tabel 2.8
Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2015 (TW3)

No	Uraian	2013		2014			2015 (TW3)		
		APBD	Realisasi	Target RPJMD	APBD	Realisasi	Target RPJMD	APBD	Realisasi
A	Penerimaan Pembiayaan			300.000.000					
1	Penggunaan SILPA	755.371.555.000	755.371.554.796	300.000.000	1.688.808.490.000	1.688.808.490.668	0	450.000.000.000	
2	Penerimaan Dana Talangan Pengadaan Pangan		67.272.727	0		254.090.908	0		
3	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir		586.832.266	0		375.703.027	0		243.292.083,00
4	Pencairan Dana Cadangan Pemilukada	500.000.000.000	549.991.811.737	0			0		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.255.371.555.000	1.306.017.471.526	300.000.000	1.688.808.490	1.689.438.603	0	450.000.000.000	243.292.083,00
B	Pengeluaran Pembiayaan								
1	Pembentukan Dana Cadangan			0			200.000.000	160.000.000.000	
2	Penyertaan Modal (Investasi)	235.791.000.000	235.791.000.000	40.000.000	75.000.000.000	72.000.000.000	75.000.000	50.000.000.000	35.000.000.000
3	Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan			0			0		
4	Pembayaran Utang Daerah			0			0		
	Jumlah pengeluaran daerah	235.791.000.000	235.791.000.000	40.000.000	75.000.000.000	72.000.000.000	275.000.000	210.000.000	35.000.000.000